

# HUKUM PIDANA KHUSUS

UNSUR DAN SANKSI PIDANANYA

EDISI  
2008

RH. 201 milis. II

Judul I

Anggaran Dasar I

DEPAN GANTAR

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.**

Buku ini merupakan hasil kerja bersama Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang unsur dan sanksi pidana khusus. Buku ini berisi empat bagian, yakni Bab 1 tentang pengertian dan definisi hukum pidana khusus, Bab 2 tentang konsep secara umum mengenai tindak pidana khusus, Bab 3 tentang tindak pidana narkotika, Bab 4 tentang tindak pidana perambangan, Bab 5 tentang tindak pidana dalam bidang pertambangan, Bab 6 tentang tindak pidana dalam dunia usaha, Bab 7 tentang tindak pidana dalam dunia taruhan, Bab 8 tentang tindak pidana pencucian uang, dan Bab 9 tentang tindak pidana pencetakan uang.

Kekurangan utama dalam buku ini, yaitu menyajikan bentuk analisis pidana khusus yang terbatas di dalam bab 1. Kekurangan ini dapat diperbaiki, karena buku ini tidak dapat memberikan pengetahuan mengenai unsur dan sanksi pidana khusus secara mendalam. Untuk itu, penulis menyarankan agar pembaca mencari sumber-sumber lain yang memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai hukum pidana khusus.



**RAJAWALI PERS**

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

v

### DAFTAR ISI

vii

### BAB 1 PENGERTIAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM

#### PIDANA KHUSUS

1

- A. Pengertian Hukum Pidana Khusus 1
- B. Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana Khusus 5
- C. Asas-asas Hukum Pidana Khusus 6
- D. Sumber-sumber Hukum Pidana Khusus 7
- E. Hubungan Hukum Pidana Khusus dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Kriminologi 224

### BAB 2 KONSEP TEORETIS DAN PENGGOLONGAN

#### TINDAK PIDANA

11

- A. Pengertian Tindak Pidana 11
- B. Penggolongan Tindak Pidana 14
- C. Sanksi Pidana 17

### BAB 3 TINDAK PIDANA KORUPSI

23

- A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 23
- B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Korupsi 31

C.	Asas-asas Hukum dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi	37
D.	Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	39
E.	Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi	43
F.	Lembaga yang Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi	49
G.	Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	50
H.	Jenis-jenis Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	52
I.	Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	52
J.	Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	77
<b>BAB 4 TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>		85
A.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	85
B.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tindak Pidana Narkotika	88
C.	Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	91
D.	Penggolongan Narkotika	92
E.	Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	103
F.	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	105
G.	Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I	105
H.	Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan II	119
I.	Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan III	130
J.	Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Prekursor Narkotika	148

K. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan kepada Pengurus atau Pimpinan, yang Menghalangi-halangi, Residivis, Pencucian Uang, WNA dan Lainnya	155
<b>BAB 5 TINDAK PIDANA PERIKANAN</b>	<b>171</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Perikanan	171
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis tentang Tindak Pidana Perikanan	174
C. Subjek dalam Tindak Pidana Perikanan	178
D. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan	180
E. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan	182
<b>BAB 6 TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN</b>	<b>215</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan	215
B. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan	220
C. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Bidang Pertambangan	221
D. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan	223
E. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan pada Orang Perorangan	224
F. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan pada Pengurus dan Badan Hukum	235
<b>BAB 7 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	<b>239</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	239
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Kekerasan dalam Rumah Tangga	242
C. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	244
D. Tindak Pidana Asal dalam Bidang Pidana Perikanan, Pidana Pencucian Uang	304

D. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	246
E. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	247
F. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Kekerasan Fisik	247
G. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Kekerasan Psikis	250
H. Sanksi bagi Pelaku yang Melakukan Kekerasan Seksual	251
I. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga	254
J. Sifat Delik Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	255
<b>BAB 8 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	<b>257</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	257
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Perdagangan Orang	262
C. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	264
D. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	266
E. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan	267
F. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Impor Orang	269
G. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Mengekspor Orang	270
H. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Pengangkutan Anak dengan Tujuan Eksplorasi	271
I. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Pengiriman Anak	272
J. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6	273

K. Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Negara yang Menyalahgunakan Kekuasaan	275
L. Sanksi Pidana bagi Orang yang Menggerakkan Orang Lain	276
M. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Membantu atau Melakukan Percobaan	277
N. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Merencanakan atau Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang	278
O. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	279
P. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Memberikan atau Memasukkan Keterangan Palsu pada Dokumen Negara atau Dokumen Lain	280
Q. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Memberikan Kesaksian Palsu	282
R. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Penyerangan Fisik	283
S. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Sengaja Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung	285
T. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Pembantuan Pelarian	286
U. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitahuan Identitas Saksi atau Korban	287
<b>BAB 9 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	291
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	291
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Pencucian Uang	297
C. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	299
D. Tindak Pidana Asal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	304

E.	Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan, Penuntutan dan Memutus Tindak Pidana Pencucian Uang	305
F.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	305
G.	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	306
H.	Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	315
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		323
<b>BIODATA</b>		329
1.	Sifat Pidana Pencucian Uang	255
2.	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	257
A.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	257
B.	Landasan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	262
C.	Pembentukan Hukum Orang-orang yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang	264
D.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	266
E.	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	267
F.	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	268
G.	Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Mengelola Orang-orang yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang	270
H.	Sanksi Pidana PENCUCIAN UANG	271
I.	A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	271
J.	B. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	272
K.	Ciri-ciri Tindak Pidana Pencucian Uang	273
L.	D. Tindak Pidana Asli sejauh Undang-Undang Tindak Pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5	273
M.	E. Sanksi Pidana Pencucian Uang	273